

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Oleh : Yosi Eka Putri, Syamsul Amar, Hasdi Aimon

---

## *Abstract*

*This study aims to analyze and determine (1) the influence of the degree of fiscal autonomy, tax ratio and investment on economic growth in Indonesia, (2) the effect of economic growth, labor productivity, investment and human development index (HDI) against income inequality in Indonesia. This research is descriptive and associative. While the type of data is data documentary, the data source is a data panel started in 2008 - 2012 in 33 provinces in Indonesia with the amount of data (n) as much as  $6 \times 33 = 198$ . This study using simultaneous equation model analysis with Indirect Least Squared method (ILS) Common Effect. The study concluded that (1) degree of fiscal autonomy, tax ratio and investment significant effect on economic growth in Indonesia. (2) variable economic growth, labor productivity, investment and Human Development Index (HDI) affect income inequality in Indonesia significantly. Based on the results of the discussion, the policies that can be suggested is the respective local government - each province is expected to maximize the role of fiscal decentralization to perform its functions effectively and efficiently. The trade off between economic growth in Indonesia by unequal distribution of income, the government is expected to focus on the target appropriate policies that spur growth by taking into account the distribution of income.*

*Keywords: income inequality, economic growth, fiscal autonomy, tax ratio, labor productivity, investment, human development index.*

## **A. Pendahuluan**

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan

negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan indikator atau suatu indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini Rasio. Seperti yang diperlihatkan oleh data pada Appendix 1, perkembangan ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini Rasio dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (berdasarkan teori dari Todaro, Barro dan Ebel & Yilmaz) yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja dan investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per pulau di Indonesia dari tahun 2008-2012. Menurut Todaro (2003) peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Namun di Pulau Papua pada tahun 2010 tidak demikian, dimana penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan ketimpangan pendapatan malah mengalami peningkatan dari 0,34 menjadi 0,37, dimana kriteria ketimpangan pendapatan mengalami perubahan dari ketimpangan rendah ke ketimpangan sedang. Ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada daerah A yang tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah B akan menyebabkan tingginya produksi pada daerah A sedangkan daerah B tidak. Oleh sebab itu, kegiatan produksi di daerah A akan semakin tinggi sedangkan di daerah B akan semakin lambat. Jika dibiarkan hal ini akan memperlebar ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2010/2011 di Pulau Kalimantan terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja, hal ini menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan produktivitas tenaga kerja akan menurunkan ketimpangan pendapatan (Ebel dan Yilmaz, 2002).

Kemudian, disamping pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja, faktor lain yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah investasi. Tingginya kegiatan investasi di daerah A dan rendahnya investasi di

daerah B maka daerah A akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah B. Oleh karena itu, hal ini akan mendorong tingginya ketimpangan pendapatan antara daerah A dan daerah B. Pada tahun 2011/2012 di Pulau Kalimantan terjadi peningkatan investasi, namun ketimpangan pendapatan malah mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan investasi pada suatu daerah tanpa diikuti oleh peningkatan investasi di daerah lainnya, akan meningkatkan ketimpangan pendapatan (Barro, 2000).

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi tingginya ketimpangan pendapatan adalah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Tahun 2010 di Pulau Sulawesi terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dibanding tahun sebelumnya dari 0,34 menjadi 0,39. Ini menunjukkan perubahan kriteria ketimpangan pendapatan dari ketimpangan rendah ke ketimpangan sedang. Namun pada tahun 2010 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan IPM pada suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan IPM di daerah lainnya akan memicu terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan (Brata, 2002).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Menurut Schumpeter (Boediono, 2002) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan

dinamis dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai dari tahun 2001 merupakan sebuah gebrakan (*big bang*) dari semula pemerintahan yang bersifat sentralistis menjadi pemerintahan yang desentralistis. daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Mangkoesoebroto, 2001).

Kebijakan desentralisasi pengeluaran dan penerimaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan bagian dari program untuk meningkatkan efisiensi pada sektor publik (pemerintah), mengurangi budget defisit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Slinko, 2002). Pemikiran yang mendasari kebijakan desentralisasi dan delegasi kewenangan ke daerah, yang diikuti secara konsisten dengan desentralisasi fiskal, adalah keyakinan bahwa pemerintah daerahlah yang dekat dan langsung berhadapan dengan rakyat, akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan rakyatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi secara ekonomi (Sommerfeld, 2002). Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan salah satu komponen penentu besar kecilnya penerimaan PAD.

Data pada Appendix 2 menunjukkan keberadaan pertumbuhan ekonomi, derajat otonomi fiskal daerah (DOFD) dan rasio pajak per pulau di Indonesia dari tahun 2008 - 2012. Menurut Apriesa (2013) dan Malik (2006) peningkatan derajat otonomi fiskal daerah akan meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi sebab akan dapat menambah jumlah pemasukan bagi daerah sehingga daerah akan menjadi lebih leluasa dalam menggunakan anggarannya untuk

berbelanja. Belanja pemerintah ini nantinya akan bisa menggerakkan ekonomi sehingga produksi barang dan jasa pada akhirnya akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak demikian yang terjadi pada tahun 2009/2010 di Pulau Papua, dimana peningkatan Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) malah menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kenaikan derajat otonomi fiskal daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Apriesa, 2013 dan Malik, 2006).

Disamping itu, kenaikan pertumbuhan ekonomi juga diduga terjadi karena menurunnya rasio pajak. Penurunan rasio pajak akan meningkatkan pendapatan disposibel yang pada nantinya akan mendorong kenaikan daya beli riil masyarakat sehingga masyarakat akan meningkatkan konsumsinya. Peningkatan konsumsi ini akan menyebabkan naiknya produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun pada tahun 2008/2009 di Pulau Papua yang terjadi malah sebaliknya, dimana rasio pajak di pulau Papua mengalami peningkatan dari 1,26 % pada tahun 2008 menjadi 1,52 % pada tahun 2009 namun pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan rasio pajak akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi (Apriesa, 2013).

Berdasarkan fenomena di atas, untuk membuktikan sejauhmana pengaruh masing-masing variabel dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan maka penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

2. Sejauhmana pengaruh pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2003:178). Dengan kata lain ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Ada dua ukuran ketimpangan pendapatan yaitu :

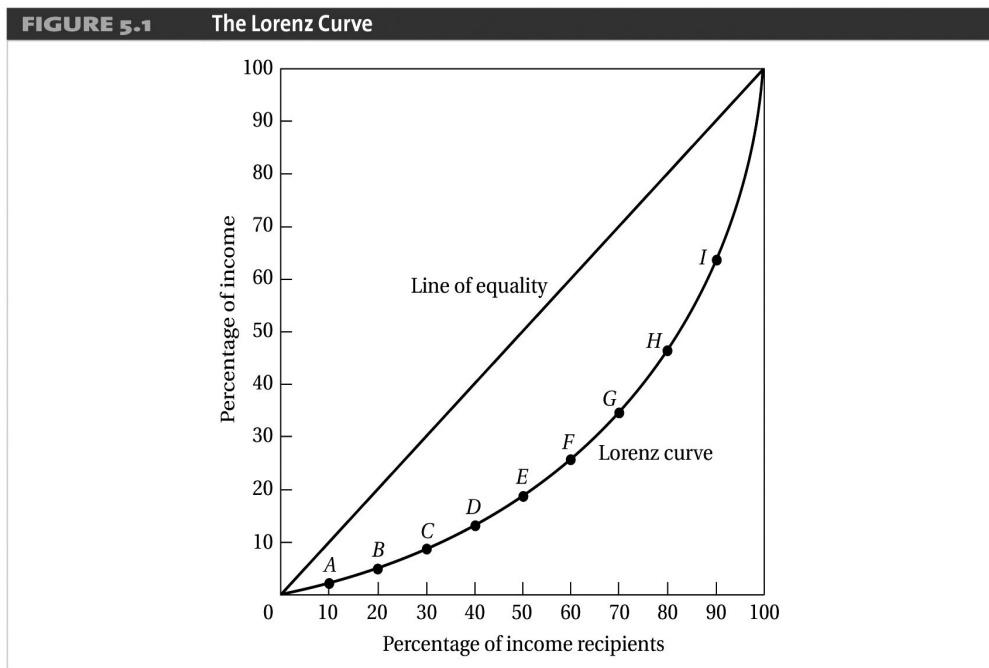
1. Koefisien Gini, adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yang bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara Kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna. Semakin kecil nilai koefisien Gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin besar nilai koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini menurut Todaro (2003) adalah: lebih dari 0,5 adalah tingkat ketimpangan tinggi; antara 0,35 - 0,5 adalah tingkat ketimpangan sedang, kurang dari 0,35 adalah tingkat ketimpangan rendah.
2. Kurva Lorenz, adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Jika kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran

ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang dikembangkan oleh Gini (1912). Kurva Lorenz diproksi atas setiap kelas interval dari pendapatan, sehingga luas area pada kurva Lorenz dapat proksi dengan koefisien Gini :

$$\dots\dots\dots (2.1)$$

dimana :  $X_k$  adalah adalah proporsi kumulatif dari jumlah rumah tangga, untuk  $k = 0, \dots, n$ , dengan  $X_0 = 0, X_n = 1$ .  $Y_k$  adalah proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke- $k$ , untuk  $k = 0, \dots, n$ , dengan  $Y_0 = 0, Y_n = 1$

3. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Semakin parah tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan suatu negara, maka bentuk kurva Lorenz nya pun akan semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah.



Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pen-dapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan

disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets “U-ter-balik”, karena perubahan longitudinal (*time series*) dalam distribusi pendapatan. Seperti yang diukur misalnya oleh Koefisien Gini, tampak seperti kurva berbentuk U-terbalik, seiring dengan naiknya GNI per kapita, pada beberapa kasus penelitian Kuznets (Todaro, 2003), menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

Alasan mengapa pada tahap awal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun kemudian membaik, ini dikaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Menurut model Lewis, tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern yang mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi.

Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah Ne-gara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Disamping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan mungkin akan meningkat lebih dahulu karena sektor modern yang muncul memerlukan tenaga kerja terampil, namun imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga kerja terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun (Todaro, 2003:254)

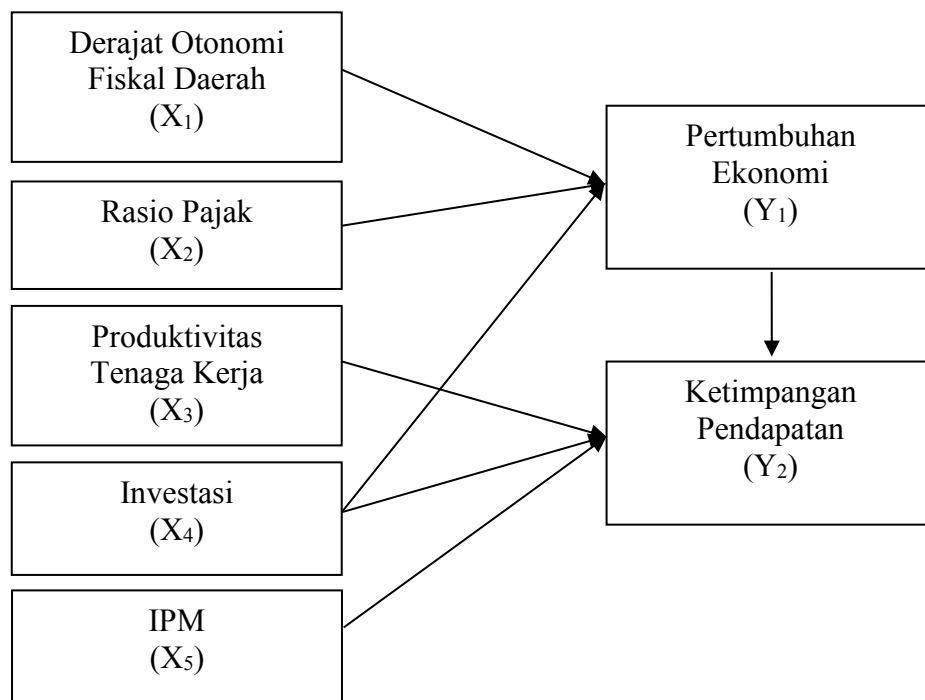
Dumairy (2004:115) mengemukakan bahwa pajak yang dikenakan pemerintah pada warganya bersifat dua macam. Pertama adalah pajak yang jumlahnya tertentu, tidak dikaitkan dengan jumlah pendapatan ( $T = T_0$ ). Kedua adalah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan, besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan ( $T = tY$ ). Jadi secara keseluruhan besarnya pajak yang diterima pemerintah adalah  $T = T_0 + tY$ .

Gagasan utama dari aliran makroekonomi sisi penawaran ialah menekankan akan pentingnya pengaruh rangsangan dari pajak (*incentive effects*



*of taxation*) di dalam menentukan perilaku dari perekonomian. Menurut para pendukung aliran makroekonomi sisi penawaran ini, penurunan di dalam tarif pajak marjinal akan mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bekerja, menabung dan menginvestasikan uangnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perekonomian yaitu kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Meningkatnya produksi atau output agregat ini menurut para pendukung aliran makroekonomi sisi penawaran juga berarti meningkatnya kemampuan perekonomian untuk menciptakan kesempatan kerja dan dengan semakin baiknya kesempatan kerja yang diciptakan maka pengangguran dalam perekonomian dapat dikurangi. Singkatnya, penawaran agregat melalui penurunan tarif pajak marjinal menurut para pendukung aliran makroekonomi sisi penawaran ini merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi yang ada (Nanga, 2005:57).

Untuk melihat hubungan diantara berbagai variabel di atas, dapat diperlihatkan dalam bentuk kerangka konseptual pada Gambar 1 bawah.



**Kerangka Konseptual**

Adapun uji analisis induktif pada penelitian ini menggunakan uji :

1. Uji Stasioner

Uji stasioner dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata, varian dan autokovarian dari data yang digunakan konstan dari waktu ke waktu (untuk berbagai lag yang berbeda nilainya sama, tidak masalah di titik mana memulai mengukur). Uji stasioner pada penelitian ini menggunakan uji akar unit (unit root test) yang dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller. Atau yang lebih dikenal dengan uji akar unit Dickey Fuller (DF).

2. Uji Kointegrasi

Uji ini digunakan untuk melihat hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel dalam suatu persamaan walaupun variabel tersebut tidak stasioner. Adapun model kointegrasi yang digunakan pada penelitian ini ialah model Engle-Granger (EG)/ Augmented Engle-Granger (AEG).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini menggunakan Uji Park.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji ini menggunakan uji Durbin-Watson.

Seperti yang dinyatakan dalam kajian teori, adapun persamaan-persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_{1t} \quad (1)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + \beta_2 X_3 + \beta_3 X_4 + \beta_4 X_5 + \mu_{2t} \quad (2)$$

Sedangkan uji identifikasi dengan order condition dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Persamaan 1 : } K-k = 5 - 3 > m - 1 = 2 - 1 \\ \rightarrow 2 > 1 \quad (\text{overidentified})$$

$$\text{Persamaan 2 : } K-k = 5 - 3 > m - 1 = 2 - 1 \\ \rightarrow 2 > 1 \quad (\text{overidentified})$$

Dari hasil *reduce form* pada persamaan di atas disimpulkan bahwa variabel endogen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel eksogen (*predetermine*) pada penelitian ini adalah derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak, produktivitas tenaga kerja, investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Uji Stasioner

Dari uji stasioner dapat diketahui bahwasannya variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak, produktivitas tenaga kerja, investasi dan HDI memiliki nilai probabilitas yang kecil dari  $\alpha = 0,05$  pada *level*.

#### 2. Uji Kointegrasi

Dari uji kointegrasi dapat diketahui bahwa pada persamaan  $D(UY1) = UY1(-1)$ , dan  $D(UY2) = UY2(-1)$  memiliki probabilitas yang kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena itu, masing-masing persamaan dalam penelitian ini berkointegrasi atau saling menjelaskan.

#### 3. Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji Heterokedastisitas dengan pada persamaan pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui didapatkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas  $\alpha > 0,05$ . Oleh karena seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas  $\alpha > 0,05$ , dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Begitu juga dari hasil uji Heterokedastisitas dengan pada persamaan ketimpangan pendapatan didapatkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas  $\alpha > 0,05$ . Oleh karena seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas  $\alpha > 0,05$ , dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Karena nilai DW pada persamaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah 1.972099 dan 2.399339 berada disekitar 2 maka berada pada daerah antara dU dan 4-dU, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Dengan arti kata pada penelitian ini tidak terdapat korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain.

#### 5. Hasil Estimasi Persamaan Simultan

##### a) Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan didapat model persamaan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

$$Y_1 = 0.367233 + 0.389295 X_1 - 0.419602 X_2 + 0.712989 X_3 \quad (3)$$

Secara parsial derajat otonomi fiskal daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara derajat otonomi fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh derajat otonomi fiskal daerah. Kondisi ini dikarenakan semakin besar kekuatan derajat otonomi fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sebab derajat otonomi fiskal memberikan ruang untuk daerah bisa menggunakan anggaran dengan lebih produktif.

Secara parsial, rasio pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara rasio pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh rasio pajak di Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila penurunan di dalam tarif pajak akan mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bekerja, menabung dan menginvestasikan uangnya yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perekonomian yaitu kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Meningkatnya produksi atau output agregat ini berarti meningkatnya kemampuan perekonomian untuk

menciptakan kesempatan kerja. Sebaliknya apabila pajak meningkat maka akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap produksi barang dan jasa juga menjadi turun. Penurunan ini akan menurunkan kegiatan perekonomian.

Secara parsial, investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi. Hal ini disebabkan apabila terjadi kenaikan terhadap investasi di Indonesia maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan mengalami kenaikan, sebab kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan karena penurunan investasi mengindikasikan telah terjadinya penurunan penanaman modal atau pembentukan modal. Penurunan penanaman modal atau pembentukan modal ini akan mengakibatkan perekonomian menurunkan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

b) Persamaan Ketimpangan Pendapatan

Dari estimasi yang telah dilakukan didapat model persamaan perekonomian adalah sebagai berikut :

$$Y_2 = 0.776340 + 0.421629Y_1 + 0.179750 X_3 + 0.368996 X_4 + 0.390444 X_5$$

Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia secara parsial. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwasannya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomidi

Indonesia. Dengan arti kata bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal - awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah - daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju. Daerah - daerah yang relatif tertinggal akan semakin ketinggalan sebab daerah tersebut memiliki banyak keterbatasan seperti tenaga kerja terdidik dan terlatih tidak tersedia, infrastruktur biasanya tidak memadai sehingga daerah ini akan semakin tertinggal. Oleh sebab itu, ketimpangan pembangunan akan semakin lebar. Jika tidak dibangun berbagai fasilitas dan faktor pendukung perekonomian di daerah tertinggal maka ketimpangan pembangunan akan tidak terhindarkan dan bahkan bisa menjadi semakin melebar.

Kemudian, produktivitas tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia secara parsial. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara produktivitas tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwasannya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif. Hal ini akan mendorong tidak seimbang pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah terutama pada kabupaten / kota di Indonesia akan semakin melebar.

Disamping itu, investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia mengindikasikan

bahwasannya naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh investasi di Indonesia. Dengan demikian investasi berpengaruh signifikan terhadap ke-timpangan pembangunan yang terjadi antar kabupaten / kota di Sumatera Barat. Kondisi ini mengartikan bahwa peningkatan investasi yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan investasi dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya investasi yang terjadi. Hal ini akan mendorong tidak seimbang nya pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah terutama pada kabupaten / kota di Sumatera Barat akan semakin melebar.

Terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pengaruh yang signifikan antara IPM terhadap ketimpangan pendapatan di

Indonesia mengindikasikan bahwasannya naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh nilai IPM. Dengan demikian IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi antar provinsi di Indonesia. IPM yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong tidak seimbang nya pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka ketimpangan pendapatan yang terjadi antar daerah akan semakin melebar.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Variabel derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, apabila derajat otonomi fiskal daerah dan investasi mengalami

peningkatan sedangkan rasio pajak turun maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia secara signifikan. Artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM akan menyebabkan peningkatan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kebijakan-kebijakan yang dapat disarankan adalah pemerintah daerah masing--masing provinsi diharapkan memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal untuk melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Adanya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan ketimpangan distribusi pendapatan maka pemerintah diharapkan mampu memfokuskan sasaran kebijakan yang tepat yakni memacu pertumbuhan dengan memperhatikan distribusi pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses modal dan kesempatan kerja (mendorong meningkatnya sektor riil yang berorientasi masyarakat menengah kebawah seperti UMKM yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Meningkatkan pengeluaran pemerintah pada pengeluaran produktif seperti pembangunan kawasan usaha yang strategis guna meningkatkan jumlah investasi sebagai modal pembangunan.



## E. Daftar Pustaka

- Apriesa, Lintangia Fajar & Miyasti. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013*.
- Boediono. 2002. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4*. Yogyakarta : BPFE.
- Badan Pusat Statistik. (2000-2010). *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS
- \_\_\_\_\_. (2000-2010). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta : BPS
- Bank Indonesia. (2000-2010). *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2000-2010). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Bank Indonesia. Melalui <<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia.html>> [09/01/2012]
- Bellante, Don dan Mark Jackson. (2000). *Ekonomi Ketenagakerjaan* (Wimandjaja K. Liotohe, MPE dan M. Yasin, SE, M.Sc. Terjemahan). Jakarta: FE UI. Buku asli diterbitkan tahun 1983.
- Boediono. (2005). *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Bonet, Jaime. (2006). *Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities : Evidence from the Colombian Experience*. Original version.
- Case, E. Karl & Ray C. Fair. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid 2 (Terjemahan)*. Jakarta : Erlangga
- Depnaker. (2004). *Penanggulangan Pengangguran di Indonesia*. Majalah Nakertrans Edisi-03 TH. XXIV- Juni.
- Dumairy.(2004). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz. (2002). *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*. World Bank Institute. Available: <http://www.worldbank.org>
- Ehrenberg, Ronald G, & Smith, Robert S. (2003). *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Eight Edition*. Pearson Education, Inc. New York City.

Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi SPSS*. Jakarta: Erlangga.

Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar*. (Drs. Ak. Sumarno Zain, MBA. Terjemahan). Jakarta : Erlangga. Buku asli diterbitkan tahun 1978.

Nanga, Muana. (2005). *Makroekonomi Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : Raja Grafindo